



POLA KEBIJAKAN PERTAMBANGAN DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUMATERA SELATAN BERDASARKAN MULTIDIMENSIONAL SCALING

THE PATTERNS OF MINING POLICY IN THE PREPARATION OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT PROGRAM (PPM) IN SOUTH SUMATERA BASED ON MULTIDIMENSIONAL SCALING

O. Sari^{1*}, M. Yusuf², A. Saptawan³

¹⁻²Program Studi Magister Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

¹⁻³Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32, Inderalaya, Sumatera Selatan, Indonesia

e-mail: oktarinasari95@gmail.com

ABSTRAK

Industri pertambangan wajib memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, salah satunya dengan melaksanakan kewajiban Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Namun pada kenyataannya, program PPM tidak berjalan maksimal dikarenakan program yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan program PPM yang sesuai dengan kondisi wilayah di tiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data tiap kabupaten di Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai 2021 berupa data aspek pertambangan, ekonomi dan sosial yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas ESDM Provinsi Sumsel. Data aspek teknis pertambangan yaitu jumlah IUP, Realisasi Rencana Reklamasi (RR), jumlah pelaporan RR, Realisasi Rencana Pascatambang (RPT), jumlah pelaporan RPT, jumlah pelaporan PPM, dan total realisasi PPM. Data aspek ekonomi yaitu data Pendapatan Perkapita, PDRB, PDRB Sektor Pertambangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan persentase penduduk miskin. Data aspek sosial yaitu pendidikan, kesehatan, kriminalitas, perumahan, dan agama. Data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis *multidimensional scaling*. Dari hasil analisis, didapatkan 10 (sepuluh) kelompok wilayah berdasarkan karakteristik masing-masing, sehingga dihasilkan 10 (sepuluh) pola kebijakan dalam menunjang perencanaan program PPM agar tepat guna dan tepat sasaran di Sumatera Selatan.

Kata kunci: program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, analisis *multidimensional scaling*, pengelompokan wilayah, sumatera selatan

ABSTRACT

The mining industry is obliged to contribute in improving the living standards of the community, especially the local communities living around the area of operation - as well as to help in the making of environmentally sustainable development, one of which is by conducting the obligations of the Community Development and Empowerment Program (PPM). However, in reality, this particular program fails to run optimally since it is still not in accordance to the needs of the community. This research aims can be in accordance planning the program to the regional conditions of each the regencies/cities in South Sumatra. The data used is the data for each of the regencies in South Sumatra (ranging from 2019 to 2021) in the form of the data related to the mining, economic, and social aspects; as well as from the Central Statistics Agency (BPS) and the Energy and Mineral Resources Office of South Sumatra. The data that are related to the technical aspects of mining are the number of IUPs, the Realization of the Reclamation Plan (RR), the number of reports on the RR, the Realization of the Post-mining Plan (RPT), the number of reports on the RPT, the number of reports on the PPM, and the total realization of the PPM. Meanwhile, the data that are related to the economic aspects are the data on Per capita income, GRDP, GRDP in the mining sector, Human Development Index (IPM), and the percentage of the poor residents. The data that are related to the social aspects are regarding education, health, crime, housing and religion. The data will be analyzed using multidimensional scaling analysis. From the results of the analysis, 10 (ten) regional groups are obtained



based on their own characteristics. This in turn creates 10 (ten) policy patterns to support the planning of the PPM program, so that it can be more effective and accurate for South Sumatra.

Keywords : community development and empowerment program, multidimensional scaling analysis, area grouping, south sumatera

PENDAHULUAN

Industri pertambangan wajib memberikan kontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama komunitas lokal di sekitar wilayah operasi dan membantu terciptanya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan [1]. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) menggambarkan suatu wujud upaya sungguh-sungguh dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri [2].

Pada pasal kedua Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Gubernur wajib menyusun dokumen Cetak Biru (*Blue Print*). *Blue Print* bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan strategis pembangunan pemerintah daerah secara terpadu yang dirumuskan ke dalam arah kebijakan yang akan dijadikan acuan Badan Usaha Pertambangan di wilayah usaha pertambangan dalam menyusun dokumen Rencana Induk PPM [3].

Multidimensional Scaling (MDS) adalah teknik statistika yang digunakan untuk memetakan atau mencari konfigurasi sejumlah obyek dalam ruang berdimensi rendah berdasarkan ukuran kesamaan (similarity) maupun perbedaan (dissimilarity) antar stimulasi atau obyek yang diteliti [4]. Obyek yang saling berdekatan dalam konfigurasi menunjukkan bahwa obyek-obyek tersebut relatif satu sama lain [5]. Sehingga dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan dapat dikelompokkan daerah-daerah yang mempunyai kesamaan atau kemiripan.

Di Provinsi Sumatera Selatan pembuatan dokumen *Blue Print* sudah direncanakan sejak tahun 2020, tetapi belum terlaksana dikarenakan alasan teknis dan biaya. Dalam penelitian ini akan didapatkan pengelompokan daerah-daerah yang memiliki kesamaan dalam aspek ekonomi, aspek teknis dan aspek lingkungan. Sehingga pemerintah provinsi tidak perlu melakukan *social mapping* ke 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan, melainkan hanya di beberapa kabupaten yang dapat mewakili kabupaten lainnya, sehingga bisa menghemat biaya pembuatan dokumen *blue print*.

Penelitian mengenai program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi kebanyakan hanya berfokus di satu daerah saja. Prawoto (2012), melakukan penelitian di daerah Dieng dengan menggunakan metode LQ, SWOT dan Analisis Trend dan hasil yang didapat yaitu Program PPM berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan [6]. Ismoyowati, dkk (2018) melakukan penelitian di Kabupaten Pacitan dengan menggunakan metode analisis AHP, hasil yang didapat yaitu pemberdayaan di Kabupaten Pacitan cenderung dipicu oleh program kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dengan jenis kegiatan seperti pembangunan fisik, pelatihan-pelatihan dan simpan pinjam serta bantuan operasional organisasi [7]. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merencanakan program PPM yang sesuai dengan kondisi wilayah di tiap kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2022 di Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data tiap kabupaten di Sumatera Selatan dari tahun 2019 sampai 2021 berupa data aspek pertambangan, ekonomi dan sosial yang didapat dari BPS Sumatera Selatan dan Dinas ESDM Sumatera Selatan. Data yang dikumpulkan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Data

Aspek	Data
Teknis Pertambangan	Jumlah IUP, realisasi Rencana Reklamasi (RR), jumlah pelaporan RR, realisasi Rencana Pascatambang (RPT), pelaporan RPT, pelaporan PPM, dan total realisasi PPM
Ekonomi	Pendapatan per kapita, Produk Domestik Regional bruto (PDRB), PDRB sektor pertambangan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan persentase penduduk miskin
Sosial	Pendidikan, kesehatan, kriminalitas, perumahan dan agama

Data realisasi rencana reklamasi dan realisasi pascatambang merupakan realisasi dari target yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur untuk

setiap perusahaan. Kemudian pengolahan data dimulai dengan melakukan rekapitulasi berdasarkan kategori data yang sesuai, lalu dilakukan pembobotan variabel penelitian dengan mencari rentang nilai masing-masing variabel. Selanjutnya data tersebut dijadikan input pada Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) menggunakan software SPSS versi 25. Hasil pengolahan data berupa *perceptual map* tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi

kesamaan antar wilayah kabupaten/kota berdasarkan kategori yang sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian yang diambil adalah data sekunder yang terdiri dari data aspek teknis pertambangan, ekonomi dan sosial sebagai berikut (Tabel 2, 3, 4, dan 5).

Tabel 2. Data Aspek Pertambangan

Kabupaten/ Kota	IUP	Realisasi i Jamrek (%)	Pelaporan Jamrek (%)	Realisasi JamPT (%)	Pelaporan JamPT (%)	Pelaporan PPM (%)	Total Biaya PPM (Rp)
OKU	9	70,1	33,3	4,5	37,0	2,3	8.336.371.131
OKI	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Muara Enim	20	27,3	13,3	19,7	16,7	7,7	2.179.923.688
Lahat	32	54,0	37,4	45,7	31,3	21,7	14.666.529.514
Musi Rawas	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Muba	38	26,3	16,2	11,4	10,3	1,3	1.439.973.879
Banyuasin	7	32,2	4,8	40,2	23,8	0,3	106.666.667
OKUS	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
OKUT	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Ogan Ilir	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3.000.000
Empat Lawang	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
PALI	3	68,4	77,8	85,8	77,8	0,0	0
Muratara	6	53,0	27,8	30,6	27,8	3,0	420.395.746
Palembang	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Prabumulih	4	33,3	8,3	0,0	0,0	0,7	6.333.333
Pagar Alam	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Lubuk Linggau	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Tabel 3. Data Aspek Ekonomi

Kabupaten/Kota	Pendapatan Per Kapita (Ribu Rupiah)	PDRB (Miliar Rp)	PDRB Pertambangan (%)	IPM	Penduduk miskin (%)
OKU	40.790,05	15.045,55	13,40	69,46	12,71
OKI	37.708,69	29.770,23	1,28	66,98	14,81
Muara Enim	96.280,70	59.879,30	55,34	68,83	12,35
Lahat	41.614,78	17.658,40	34,72	67,55	16,11
Musi Rawas	48.998,79	19.572,77	32,56	66,91	13,59
Musi Banyuasin	107.815,29	68.131,87	55,36	67,87	16,13
Banyuasin	35.001,64	29.580,78	6,13	66,92	11,08
OKU Selatan	23.049,21	9.096,42	1,81	65,36	10,83
OKU Timur	23.497,20	15.490,44	2,39	69,40	10,49
Ogan Ilir	27.322,84	11.514,65	8,14	67,15	13,50
Empat Lawang	17.013,26	5.160,12	3,94	65,25	12,76

PALI	37.397,90	7.250,45	43,24	64,64	13,00
Musi Rawas Utara	38.540,16	7.339,50	24,38	64,58	19,57
Palembang	93.955,17	157.360,21	0,00	78,50	11,04
Prabumulih	41.611,20	8.002,59	10,64	74,54	11,80
Pagar Alam	20.160,57	2.875,98	2,67	68,48	9,12
Lubuk Linggau	29.004,43	6.801,29	1,76	74,83	12,96

Tabel 4. Data Aspek Sosial

Kabupaten	Kesehatan				Pendidikan			
	Faskes	Nakes	Kasus Penyakit	BPJS	Guru	Sekolah	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Kasar
OKU	386	2.328	3242	7,83	6440	367	60,5	82,3
OKI	881	2.545	1923	16,47	11716	857	60,7	73,8
Muara Enim	460	2.603	7062	21,96	9700	630	67,2	93,0
Lahat	503	1.862	962	20,44	8305	470	67,4	80,6
Musi Rawas	356	1.702	2558	16,26	6356	488	63,1	77,8
Muba	619	2.538	1895	7,51	10371	809	59,5	79,0
Banyuasin	826	2.339	1867	13,39	12409	886	56,7	71,3
OKU Selatan	353	1.400	1330	5,25	6343	437	61,6	77,2
OKU Timur	731	3.108	2090	5,45	11081	754	53,4	68,5
Ogan Ilir	379	1.924	924	39,30	7548	479	57,6	73,2
Empat Lawang	193	865	689	6,34	4335	252	61,7	86,2
Pali	139	896	1225	31,13	3395	237	53,3	79,9
MURATARA	152	1.017	796	8,45	3353	221	52,2	61,7
Palembang	1.173	10.599	8838	11,89	20409	942	62,4	102,2
Prabumulih	160	2.022	798	11,81	3323	172	61,8	73,5
Pagar Alam	153	695	542	5,94	2952	153	66,8	82,8
Lubuk Linggau	134	1.498	1622	29,28	4157	206	56,9	67,1

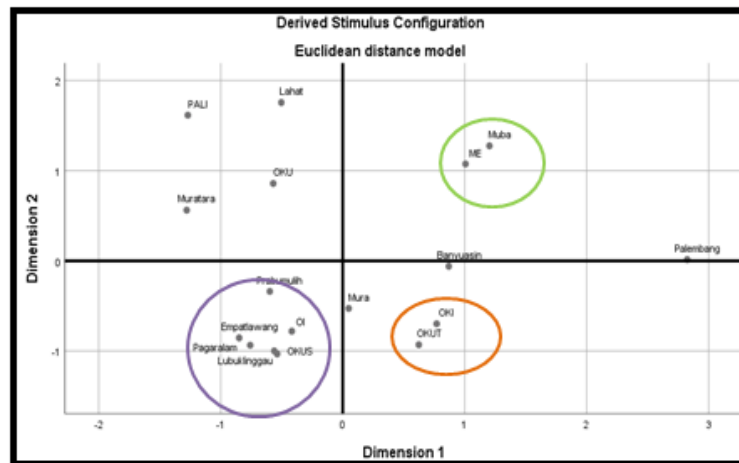
Tabel 5. Data Aspek Sosial (Lanjutan)

Kabupaten	Kriminalitas		Perumahan (%)				Agama
	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana (%)	Listrik	PDAM	Air bersih	Jamban sendiri	Tempat Ibadah
OKU	291	71,23	99,32	32,70	72,18	72,69	461
OKI	612	74,40	97,63	22,80	60,14	59,25	1142
Muara Enim	428	81,11	99,23	26,90	63,94	76,07	1027
Lahat	382	81,73	99,80	17,58	52,18	58,45	531
Musi Rawas	337	98,57	97,75	10,36	61,26	61,97	632
Muba	532	90,90	89,42	38,54	64,93	65,90	832
Banyuasin	643	72,74	98,25	41,74	49,28	61,55	1172
OKU Selatan	136	78,02	89,00	15,26	47,12	48,75	416
OKU Timur	299	77,10	99,69	5,25	56,33	77,01	1240
Ogan Ilir	255	69,08	98,43	34,64	65,69	63,14	469
Empat Lawang	108	86,70	95,24	5,34	22,38	39,60	231

Pali	56	47,81	99,55	29,49	61,22	86,98	275
Muratarra	43	44,02	96,80	15,05	51,68	56,02	181
Palembang	3329	76,67	99,88	95,09	97,08	88,11	1609
Prabumulih	362	76,53	99,88	32,27	68,86	86,66	227
Pagar Alam	147	61,82	99,34	7,60	55,92	42,55	223
Lubuk Linggau	442	101,22	99,74	29,06	65,46	82,26	238

Dari hasil penjabaran di atas, pada tahun 2021 terdapat 130 IUP batubara di Sumatera Selatan. Dari keseluruhan IUP tersebut, terdapat banyak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya seperti penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang serta pelaksanaan PPM yang belum maksimal. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak juga masih menjadi salah satu masalah di Sumatera Selatan [8]. Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan pendapatan perkapita tertinggi dan pendapatan perkapita terendah, ini adalah salah satu faktor pemicu kriminalitas [9]. Pendapatan perkapita tertinggi terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim dan Kota Palembang,

sedangkan pendapatan perkapita terendah di Kabupaten Pagaralam. Variabel-variabel pada aspek teknis pertambangan, ekonomi, dan sosial tersebut kemudian dilakukan pembobotan terhadap variabel penelitian dengan mencari rentang nilai masing-masing variabel yang nantinya akan digunakan sebagai input analisis MDS. Proses analisis akan menggunakan *software spss* versi 25. *Output* yang dihasilkan terdiri atas matriks jarak *euclidean*, proses iterasi, nilai *stress* dan *RSQ (squared correlation)*, *perceptual map*, dan *scatterplot* [10]. Nilai *stress* yang dihasilkan adalah 0,27249 dan nilai *RSQ* adalah 0,76981. Setelah dilakukan analisis MDS maka didapatkan *perceptual map* sebagai berikut.



Gambar 1. Perceptual Map

Hasil *perceptual map* menunjukkan penyebaran posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Gambar 1). Berdasarkan kedekatan posisi dapat dikelompokkan daerah yang memiliki kesamaan karakteristik menjadi 3 (tiga) kelompok kecuali Kota Palembang, Kabupaten PALI, Lahat, Musi Rawas Utara, OKU, Banyuasin dan Musi Rawas yang memiliki karakteristik sendiri dan tidak berada dalam kelompok tertentu. Kelompok pertama terdiri dari Kabupaten Prabumulih, OI, Empat Lawang, OKU Selatan, Lubuk Linggau dan Pagaralam. Kelompok kedua yaitu OKI dan OKU Timur. Kelompok ketiga yaitu Muara Enim dan Musi Banyuasin. Pengelompokan wilayah di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Kelompok Kesamaan Wilayah

No	Kelompok Kesamaan Wilayah
1	Prabumulih, Ogan Ilir, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu Selatan, Lubuk Linggau dan Pagaralam
2	Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur
3	Muara Enim dan Musi Banyuasin
4	Palembang
5	PALI
6	Lahat
7	Musi Rawas Utara
8	OKU
9	Banyuasin
10	Musi Rawas



Kelompok pertama yang terdiri dari Kabupaten, Prabumulih, Ogan Ilir, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu Selatan, Lubuk Linggau dan Pagaralam memiliki kesamaan dalam hal jumlah IUP batubara yang rendah bahkan tidak ada sama sekali, pendapatan per kapita dan PDRB yang rendah, persentase pelaporan jaminan reklamasi, pascatambang dan PPM yang rendah, jumlah sekolah dan tenaga pengajar yang minim, fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang kurang memadai serta distribusi air ledeng kurang merata.

Sama halnya dengan kelompok pertama, kelompok kedua yang terdiri dari Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Ogan Komering Ulu Timur juga hanya memiliki jumlah IUP batubara yang rendah, pendapatan per kapita dan PDRB yang rendah, persentase pelaporan jaminan reklamasi, pascatambang dan PPM yang rendah, pendapatan per kapita dan PDRB yang rendah serta angka IPM yang rendah. Pada bidang sosial, kelompok wilayah ini memiliki jumlah tenaga kesehatan yang minim padahal jumlah fasilitasnya tergolong tinggi, distribusi air ledeng yang masih rendah, dan angka partisipasi kasar pendidikan tergolong rendah.

Kabupaten Muara Enim dan Musi Banyuasin adalah dua kabupaten yang memiliki jumlah IUP batubara tertinggi di Sumatera Selatan. Hal ini juga yang menyebabkan pendapatan perkapita dan PDRB daerah tersebut merupakan yang tertinggi di Sumatera Selatan. Sektor pertambangan menyumbang hampir lima puluh persen untuk PDRB wilayah. Tetapi pendapatan per kapita tinggi tidak lantas membuat angka IPM di kabupaten tersebut tinggi, persentase penduduk miskin pun cukup tinggi serta jumlah tenaga kesehatan yang rendah.

Palembang merupakan kota di Sumatera Selatan yang memiliki pendapatan per kapita dan PDRB yang tertinggi meskipun tidak memiliki IUP batubara di wilayahnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai pemasukan sektor lainnya seperti perdagangan, industri, dan infrastruktur. Keadaan sosial di Kota Palembang pun sudah sangat baik dibanding daerah-daerah lainnya seperti distribusi air ledeng yang sudah merata, jumlah sekolah dan tenaga pengajar yang memadai, jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan yang

tinggi, jumlah tempat ibadah yang tinggi, angka IPM yang tinggi serta persentase penduduk miskin yang rendah.

PALI adalah Daerah Otonom Baru (DOB) di Sumatera Selatan yang baru berdiri pada tahun 2013 sebagai pemekaran dari Kabupaten Muara Enim. Di PALI terdapat 3 (tiga) IUP Batubara dengan persentase dan pelaporan jaminan reklamasi serta jaminan pascatambang yang tinggi. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan ekonomi dan sosialnya seperti pendapatan per kapita rendah, angka IPM yang rendah serta persentase penduduk miskin yang tinggi, jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang rendah, jumlah sekolah dan guru yang minim, serta jumlah ibadah yang masih rendah.

Daerah lainnya yang memiliki cukup banyak IUP batubara di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Lahat, kabupaten tersebut memiliki realisasi jaminan reklamasi tinggi serta dana PPM yang tinggi. Namun hal itu tidak kunjung membuat keadaan ekonomi di kabupaten tersebut meningkat. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan perkapita dan PDRB wilayah yang rendah, jumlah guru yang minim, jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan rendah, serta jumlah tempat ibadah yang rendah.

Musi Rawas Utara merupakan DOB lainnya di Sumatera Selatan, hal ini juga yang menyebabkan keadaan sosial dan ekonomi di kabupaten tersebut masih rendah, seperti nilai IPM, jumlah sekolah dan guru, jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan, distribusi air ledeng serta jumlah tempat ibadah. Musi Rawas Utara juga memiliki pendapatan per kapita yang rendah serta persentase penduduk miskin yang tinggi.

Kabupaten Banyuasin, Ogan Komering Ulu (OKU) dan Musi Rawas juga merupakan daerah di Sumatera Selatan yang memiliki jumlah IUP batubara yang sedikit dan tingkat ekonomi serta sosialnya masih rendah seperti jumlah fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih rendah, jumlah tenaga pegajar yang minim, pendapatan perkapita dan PDRB rendah. Program PPM yang sesuai untuk tiap daerah di Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pola Kebijakan PPM untuk kabupaten/kota di Sumatera Selatan

Kabupaten	Pola Kebijakan PPM
Prabumulih, Ogan Ilir, Empat Lawang, OKUS, Lubuk Linggau	Sosial - Bantuan tenaga pengajar untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat serta bantuan tenaga kesehatan - Bantuan sumur bor untuk masyarakat



dan Pagaramalam	Ekonomi <ul style="list-style-type: none">- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan
OKI dan OKU Timur	Sosial <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur air dan sumur bor untuk masyarakat- Bantuan dana pendidikan (beasiswa, kursus, dan pakaian serta peralatan sekolah) serta bantuan tim kesehatan perusahaan untuk memberikan pengobatan pada masyarakat setiap satu bulan Ekonomi <ul style="list-style-type: none">- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan
Muara Enim dan Musi Banyuasin	Sosial <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur air dan sumur bor untuk masyarakat.- Bantuan tim kesehatan perusahaan untuk memberikan pengobatan pada masyarakat setiap satu bulan.- Pemberian beasiswa dan bantuan dana pendidikan untuk masyarakat lokal yang akan melanjutkan pendidikan tinggi pada bidang kesehatan. Ekonomi <ul style="list-style-type: none">- Membuat kajian ekonomi untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui komoditas utama masyarakat lokal- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan Bantuan untuk pemasaran produk masyarakat lokal
Palembang	Pertambangan <ul style="list-style-type: none">- Sosialisasi dampak pemompaan dan pengerukan sedimen sungai untuk mengambil pasir.- Arahan penggunaan peralatan sedot atau gali yang menimbulkan dampak minimal terhadap ekosistem sungai dan Pelaporan RKAB yang rutin.
PALI	Sosial <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur air dan sumur bor untuk masyarakat- Bantuan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan- Pemberian beasiswa dan bantuan dana pendidikan untuk masyarakat lokal yang akan melanjutkan pendidikan tinggi pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.- Pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Ekonomi <ul style="list-style-type: none">- Membuat kajian ekonomi untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui komoditas utama masyarakat lokal- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan- Bantuan untuk pemasaran produk masyarakat lokal seperti pertanian nanas
Lahat	Sosial <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur air dan sumur bor untuk masyarakat- Bantuan tim kesehatan dan tenaga pengajar- Pemberian beasiswa dan bantuan dana pendidikan untuk masyarakat lokal yang akan melanjutkan pendidikan tinggi pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.- Pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat Ekonomi <ul style="list-style-type: none">- Membuat kajian ekonomi untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui komoditas utama masyarakat lokal- Bantuan dana perbaikan dan penambahan fasilitas wisata- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang



	<ul style="list-style-type: none">- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan- Bantuan untuk pemasaran produk masyarakat lokal
Musi Rawas Utara	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur air dan sumur bor untuk masyarakat- Bantuan tim kesehatan dan tenaga pengajar- Pemberian beasiswa dan bantuan dana pendidikan untuk masyarakat lokal yang akan melanjutkan pendidikan tinggi pada bidang kesehatan dan bidang pendidikan.- Pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat <p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuat kajian ekonomi untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui komoditas utama masyarakat lokal- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan- Bantuan untuk pemasaran produk masyarakat lokal
Banyuasin	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur bor untuk masyarakat- Bantuan tenaga pengajar dan tenaga kesehatan <p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal usaha terutama terkait dengan pertanian dan perkebunan
Ogan Komering Ulu	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur air dan sumur bor untuk masyarakat- Bantuan tim kesehatan dan tim pengajar- Pemberian beasiswa dan bantuan dana pendidikan untuk masyarakat lokal yang akan melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan dan pendidikan.- Pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat <p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">- Membuat kajian ekonomi untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui komoditas utama masyarakat lokal- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan- Bantuan untuk pemasaran produk masyarakat lokal
Musi Rawas	<p>Sosial</p> <ul style="list-style-type: none">- Bantuan sumur air dan sumur bor untuk masyarakat- Bantuan tim kesehatan perusahaan dan tenaga pengajar- Pemberian beasiswa dan bantuan dana pendidikan untuk masyarakat lokal yang akan melanjutkan pendidikan di bidang kesehatan dan pendidikan.- Pembangunan tempat ibadah untuk masyarakat <p>Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat melalui optimalisasi komoditas utama masyarakat lokal- Pelatihan dan pendampingan program wirausaha untuk masyarakat- Penerimaan pekerja dari masyarakat sekitar tambang- Pemberian bantuan modal awal dan modal tambahan untuk wirausahawan



KESIMPULAN

Provinsi Sumatera Selatan memiliki 17 kabupaten/kota yang memiliki beragam kondisi wilayah. Setelah dilakukan analisis menggunakan analisis MDS didapatkan kelompok daerah yang memiliki kesamaan karakteristik menjadi 3 (tiga) kelompok kecuali Kota Palembang, Kabupaten PALI, Lahat, Musi Rawas Utara, OKU, Banyuasin dan Musi Rawas yang memiliki karakteristik sendiri dan tidak berada dalam kelompok tertentu. Kelompok pertama terdiri dari Kabupaten Prabumulih, Ogan Ilir, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS), Lubuk Linggau dan Pagaralam. Kelompok kedua yaitu Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). Kelompok ketiga yaitu Muara Enim dan Musi Banyuasin. Dari pengelompokan tersebut didapatkan 10 pola kebijakan untuk 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan guna mendukung program PPM yang tepat guna dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Garaika. (2020). Urgency Corporate Social Responsibility (CSR) Towards Corporate Development in Indonesia. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(2), 310-315.
- [2] Rahayu, S. dan Yetniwati. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Batubara melalui Program PPM. *Zaaken: Journal of Civil dan Bussiness Law*, 2(2), 221-230.
- [3] Ridwan, M. dan Sundoyo. (2020). Kajian PPM Tambang Batubara Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat pada PT. Baramulti Suksessarana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Geologi Pertambangan*, 27(1), 1-13.
- [4] Nahar, J. (2019). Penerapan Metode Multidimensional Scaling dalam Pemetaan Sarana Kesehatan di Jawa Barat. *Jurnal Matematika Integratif*, 12 (1), 43-50.
- [5] Sumin. (2017). Penerapan Analisis MDS untuk Memetakan Persepsi *Stakeholders* terhadap Lulusan IAIN Pontianak. *At-turats Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam*, 11(2), 97-104.
- [6] Prawoto. (2012). Model PPM Berbasis Kemandirian untuk Mewudkan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi pada Masyarakat Dieng di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen.*, 8(2), 135-154.
- [7] Ismoyowati, D., Mafruhah, I., Mulyani, NS., dan Istiqomah, N., (2019). Pengembangan Inovasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Pacitan. *Zaaken: Journal of Civil dan Bussiness Law*, 2(2), 221-230.
- [8] Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. (2021). Sumatera Selatan dalam Angka. Palembang.
- [9] Khairani, R., dan Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas di Sumatera Selatan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4 (2), 99-110.
- [10] Waristian, H. (2016). Pemetaan Potensi Sektor Pertambangan Provinsi Sumsel Melalui Penggunaan Multidimensional Scaling. *Prosiding AVoER*, Palembang: Fakultas Teknik UNSRI.